

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aparat pengawas keuangan pemerintah di Indonesia dilakukan secara berlapis-lapis, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota. (BPK), sebagai eksternal auditor dari pemerintahan bertugas melakukan pemeriksaan dan pemberian opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara/Daerah merupakan upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu badan pengawas keuangan seperti yang telah dijelaskan di atas adalah Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota. Badan pengawasan ini merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Mulyadi (2004:29) mendefinisikan.

“Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah”.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan pada badan pemeriksaan tersebut. Krisis kepercayaan yang menimpa badan pemeriksaan di Indonesia semakin terlihat jelas seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia (Sevrida 2011). Untuk mengatasi masalah krisis tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan etika profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik auditor di Indonesia diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

IAI telah berupaya untuk menegakkan etika profesi bagi akuntan. namun demikian, perilaku etis dari para auditor masih tetap ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus Kimia Farma dan Bank Lippo, dengan melibatkan kantor-kantor akuntan yang selama ini diyakini memiliki kualitas audit tinggi. Kasus Kimia Farma dan Bank Lippo juga berawal dari terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan (Winarto, 2002). Kasus

lain yang cukup menarik yaitu kasus audit PT. Telkom yang melibatkan KAP "Eddy Pianto & Rekan" (Media Akuntansi ed. 34, 2003). dalam kasus ini laporan keuangan audit PT. Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat). Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap PT. Telkom oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lain. Selain itu Kasus keterlibatan 10 KAP yang melakukan audit terhadap bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha, dalam kasus ini melibatkan KAP papan atas (Winarto, 2002).

Di samping itu, kasus penggelapan pajak oleh KAP "KPMG Sidharta Sidharta & Harsono" yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman Christensen) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Sinaga, dkk. dalam Ludigdo, 2006).

Berdasarkan apa yang terjadi, dan mengingat bahwa masalah utama yang paling sering dipersoalkan berkaitan dengan etika profesi dari para auditor tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya, maka peneliti ingin mengkaji apakah tingkat pendidikan (faktor internal) dan budaya organisasi (faktor eksternal) dapat mempengaruhi perilaku etis para auditor. Fokus penelitian ini yaitu auditor yang ada pada Inspektorat Kota Gorontalo. Hal ini dikarenakan kurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh auditor yang ada di lingkungan Inspektorat Kota Gorontalo selama lima tahun terakhir. Walaupun tingkat pendidikan para auditor sebagian besar adalah strata satu (S1), dan

budaya organisasi yang ada dalam lingkungan belum diterapkan secara keseluruhan. Robbins (2006;172), secara garis besar menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh dua hal yaitu : (1) Aspek individual atau aspek internal adalah perilaku individu yang diyakini berada dibawah kendali pribadinya untuk menanggapi dunia luar secara selektif. (2) Aspek luar atau eksternal adalah hal-hal atau keadaan dari luar yang merupakan rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau mengubah perilaku.

Hal di atas menunjukkan bahwa seseorang bisa atau tidaknya berperilaku etis ditentukan oleh faktor internal, dimana kemampuan seseorang bisa mengendalikan dirinya untuk melakukan sesuatu yang diperbuat. Selain itu faktor eksternal (budaya organisasi) juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang di mana seseorang akan berbuat sesuai budaya yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Aspek individual menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu misalnya dipengaruhi oleh Pendidikan/Kecerdasan (Maryani dan Ludigdo, 2001; Muhlis, 2012). Sedangkan pada aspek eksternal atau luar yang mempengaruhi perilaku individu misalnya berasal dari pengaruh situasional budaya organisasi (Widyastuti dan Ludigdo, 2010). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan (faktor internal) dan budaya organisasi (faktor eksternal) merupakan faktor yang mempengaruhi auditor untuk melakukan perilaku etis

Menurut Sudiby (1995) dalam Khomsiyah dan Indriantoro (1997), pendidikan akuntansi (pendidikan formal) mempunyai pengaruh yang besar

terhadap perilaku etis akuntan sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak saja bertanggungjawab pada pengajaran ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada mahasiswanya tetapi lebih dari itu bertanggungjawab mendidik mahasiswa agar mempunyai kepribadian (*personality*) yang utuh sebagai manusia.

Selain tingkat pendidikan (faktor internal) sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, Budaya Organisasi (faktor eksternal) juga dapat mempengaruhi perilaku etis seorang Auditor. Budaya organisasi adalah komitmen yang ditanamkan dalam lingkungan kerja untuk menjadi bahan pertimbangan seseorang dalam melakukan sesuatu. Hal ini dijelaskan oleh robbin (1996) bahwa: tahap perkembangan moral, *locus of control*, dan lingkungan organisasi merupakan faktor yang menyebabkan perilaku pengambilan keputusan yang etis. Dalam penelitian Metha dan Shiddiq (2012) bahwa komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap hasil audit artinya budaya yang ditanamkan melalui komitmen menjadi bahan pertimbangan bagi auditor untuk bertindak etis dalam menjalankan tugasnya. Selain penjelasan di atas, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wiwied dan Ludigdo (2010), Falah (2007), Hidayat dan Handayani (2010), Putri dan Juliarsa (2014), dan Batubara (2008).

Dalam penelitian yang dilakukan Wiwied dan Ludigdo (2010) tentang pengaruh kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ) dan budaya organisasi terhadap pembentukan perilaku etis pada KAP, secara signifikan

mereka juga melihat mana yang lebih dominan untuk mempengaruhi perilaku etis auditor tersebut. Hasil penelitian bahwa budaya organisasi sangat berpengaruh pada perilaku etis auditor.

Selanjutnya Penelitian Falah (2007) mengenai pengaruh budaya etis organisasi dan orientasi etika terhadap sensitivitas etika Studi Empiris Tentang Pemeriksaan Internal di Bawasda Pemda Papua. Hasil penelitian bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dengan idealisme atau dengan kata lain budaya etis organisasi dapat merubah perilaku seseorang.

Selain itu, penelitian Hidayat dan Handayani (2010) tentang Peran Faktor-faktor Individual dan Pertimbangan Etis Terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit pada Lingkungan Inspektorat Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa salah satu faktor individual adalah tingkat pendidikan, Interaksi antara tingkat pendidikan dengan pertimbangan etis berpengaruh secara signifikan, yang berarti bahwa interaksi antara tingkat pendidikan dengan pertimbangan etis mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit.

Penelitian Fitri dan Juliarsa (2014) tentang pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman dan kepuasan kerja auditor pada kualitas audit Kantor Akuntan Publik di Bali. membuktikan bahwa variabel independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor berpengaruh secara

simultan terhadap kualitas audit. Secara parsial hanya tingkat pendidikan dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian Batubara (2008) tentang analisis pengaruh latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan (study empiris pada BAWASKO Medan) menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksaan sebagai variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan sebagai variabel dependen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Etis Auditor Pada Inspektorat Kota Gorontalo.***

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemanfaatan pendidikan non formal, sehingga dapat mempengaruhi perilaku etis Auditor Inspektorat Kota Gorontalo.
2. Kurangnya penerapan budaya organisasi dalam lingkungan kerja auditor Inspektorat Kota Gorontalo.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat pendidikan, budaya organisasi dan perilaku etis pada Inspektorat Kota Gorontalo
2. Apakah tingkat pendidikan yang dimiliki auditor, berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor pada Inspektorat Kota Gorontalo.
3. Apakah budaya organisasi yang ada berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor pada Inspektorat Kota Gorontalo.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan, budaya organisasi dan perilaku etis pada Inspektorat Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang dimiliki auditor, terhadap perilaku etis auditor pada Inspektorat Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku etis auditor pada Inspektorat Kota Gorontalo.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi terutama dalam hal pendidikan, budaya organisasi dan perilaku etis para auditor.
- b. penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan tentang pengaruh dari tingkat pendidikan dan budaya organisasi terhadap perilaku etis para auditor.
- c. Bagi akademik, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan budaya organisasi terhadap perilaku etis auditor.

#### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Gorontalo penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk pengembangan perilaku etis auditor dimasa yang akan datang.